

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PUSAT
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIKINDONESIA
(PKPRI) KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**NAMA : BAYU INDRA DEWA
NPM : 1505170260
PRODI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : BAYU INDRA DEWA
N.P.M : 1505170260
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISA PENERAPAN AKUNTANSI PADA PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKPRI) KOTA MEDAN

Disyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I 

Penguji II 

(SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si.)

(ISNA ARDILA, S.E., M.Si.)

Pembimbing

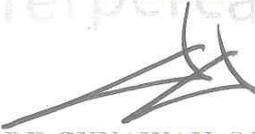

(NOVIEN RIALDY, S.E., M.M.)

PANITIA UJIAN

Ketua


(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris


(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : BAYU INDRA DEWA
N P M : 1505170260
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Skripsi : ANALISA PENERAPAN AKUNTANSI PADA PUSAT KOPERASI
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, FEBRUARI 2019

Pembimbing Skripsi


(NOVIEN RIALDY, SE,MM.)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis


(H. JANURI, S.E.,

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Indra Dewa
NPM : 1505170260
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALIISA PENERAPAN AKUNTANSI PADA
PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA KOTA MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari UPT Samsat Medan Selatan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, MARET 2018

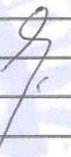
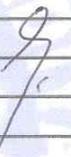
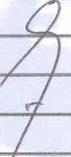
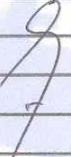
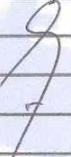
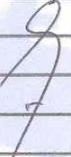
Yang membuat pernyataan



BAYU INDRA DEWA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : BAYU INDRA DEWA
N.P.M : 1505170260
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
**Judul Skripsi : ANALISA PENERAPAN AKUNTANSI PADA PUSAT KOPERASI
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA MEDAN**

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
19/02	Halaman awal bab dan halaman kelanjutnya diperbaiki		
19/02	Pada bagian akhir di bagian akhir dengan teori dan hasil penelitian		
26/02	Daftar isi diperbaiki		
19/02	Berunding dengan pendamping dan bagian kata kunci pendahuluan		
27/02	Perbaiki daftar tabel dan daftar gambar		
19/02	Abstrak satu paragraf		
19/02	Referensi dimasukkan		
19/02	Bab 10 pembahasan dan analisis lebih dari sebelumnya ke pokok bahasan		
02/19/02	Ace Skripsi		

Medan, Februari 2019

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi


NOVIEN RIALDY, SE, MM


FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

BAYU INDRA DEWA NPM 1505170260. Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam koperasi perlu adanya laporan keuangan. Aktivitas koperasi yang mempengaruhi keuangan dalam setiap bulannya perlu diketahui, sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Dengan diterapkannya system akuntansi pada koperasi akan mempermudah mengetahui laba atau rugi koperasi selama satu periode.

Penelitian ini dilakukan di Jalan Durian No. 2 H Kota Medan. Berkenaan dengan dilakukannya penelitian ini yang menjadi subjek adalah Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP serta untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi perkoperasian menurut SAK ETAP yang dilakukan oleh Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyajian laporan keuangan dan penerapan akuntansi perkoperasian yang dilakukan oleh Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan belum sepenuhnya dapat memberikan informasi dan belum sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku.

Kata Kunci : Koperasi, Akuntansi, SAK ETAP

KATA PENGANTAR



Rasa syukur yang dalam saya sampaikan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat-Nya proposal penelitian ini dapat penulis selesaikan sesuai yang diharapkan. Shalawat seriring salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan cahaya terang dalam segenap unsur kehidupan. Dalam proposal penelitian ini penulis membahas **“Analisis Penerapan Akuntansi Perkoperasian Pada Pusat Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan”**

Dalam proses pembuatan karya ilmiah (skripsi) ini, tentunya penulis mendapatkan bimbingan, arahan, koreksi dan saran yang telah banyak membantu penulis dalam proses pembuatan proposal penelitian ini, Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapatkan imbalan Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sangat teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Sali dan Ibunda Yusniar Ritonga serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta dukungannya. Do'a dan dukungan moril maupun material kepada penulis. Kiranya Allah SWT membalas dengan segala kebaikan-Nya. Dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Ade Gunawan SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung SE.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih SE. M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum SE. M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta
7. Bapak Novien Rialdy, SE.,MM, selaku Dosen Pembimbing proposal dan skripsi yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu serta telah banyak memberikan dukungan, pemikiran, pengarahan kepada penulis selama penyusunan proposal ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Serta sahabat – sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu , terima kasih atas dukungan kalian semua.

Semoga laporan proposal ini dapat bermanfaat secara khusus bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Medan, Februari 2019

Penulis

BAYU INDRA DEWA
NPM : 1505170260

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Koperasi	
1. Pengertian Koperasi.....	8
2. Perbedaan Antara Koperasi dan Non Koperasi.....	9
3. Landasan & Asas Koperasi	10
4. Tujuan Koperasi	10
5. Prinsip-prinsip Koperasi	10
6. Jenis-jenis Koperasi.....	11
7. Pemodalannya	13
B. Penyajian Laporan Keuangan	
1. Pengertian & Tujuan Laporan Keuangan	15
2. Karakteristik Kualitatif dalam Laporan keuangan	19
C. Akuntansi	
1. Pengertian Akuntansi dan Lingkungannya	20
2. Konsep dan Prinsip Akuntansi	21

3.	Jenis Laporan Keuangan.....	23
D.	Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik	
1.	Pengertian SAK ETAP	25
2.	Manfaat SAK ETAP	25
3.	Kriteria ETAP	26
4.	Penyajian Laporan Keuangan SAK ETAP	27
E.	Penelitian Terdahulu.....	29
F.	Kerangka Berfikir.....	29
 BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Pendekatan Penelitian.....	31
B.	Definisi Variabel	31
C.	Lokasi dan Waktu Penelitian	32
D.	Jenis-Jenis Sumber Data.....	33
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	33
F.	Teknik Analisis Data	34
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
A.	Hasil penelitian.....	37
1.	Gambaran umum PKPRI.....	37
1.1.	Sejarah terbentuknya PKPRI kota medan.....	37
1.2.	Visi dan misi PKPRI kota medan.....	37
1.3.	Struktur organisasi PKPRI kota medan	
2.	Deskripsi data	
B.	Pembahasan	

1. Penyajian akuntansi pada PKPRI kota medan.....
2. Penerapan akuntansi pada PKPRI kota medan.....
3. Penerapan akuntansi pada PKPRI kota medan.....

BAB V HASIL KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA.....

DAFTAR TABEL

- 1.1. Tabel laporan keuangan PKPRI kota medan (neraca)
- 1.2. Tabel perbedaan koperasi dan non koperasi
- 1.3. Tabel penelitian terdahulu
- 1.4. Tabel waktu dan tempat penelitian

DAFTAR GAMBAR

- 2.1. Gambar kerangka berfikir
- 2.2. Gambar struktur PKPRI kota medan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang mempunyai peranan dalam perekonomian Indonesia. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu terus didorong perkembangannya. Dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi koperasi harus dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mandiri yang pertumbuhannya berakar dari masyarakat. Sebagai suatu badan usaha yang berwatak sosial dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha milik negara dan swasta. Ciri utama koperasi adalah pengelolaan dan kelangsungan koperasi yang dikendalikan oleh anggota. Sehingga kekuasaan tertinggi terletak pada anggota melalui rapat anggota tahunan. Ciri lainnya, anggota koperasi memiliki identitas ganda yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Sebagai alat pertanggungjawaban, koperasi perlu menyusun laporan keuangan yang merupakan salah satu sumber informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan, perencanaan maupun pengendalian koperasi. Laporan keuangan koperasi memiliki perbedaaan dengan laporan keuangan badan usaha lain. Diantaranya adalah pada perkiraan modal terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, Modal Penyertaan, Sumbangan dan Sisa Hasil Usaha Yang Belum Dibagi, sedangkan pada badan

usaha lainya seperti CV, pemodalannya merupakan milik sekutu komanditier dan pemodalan berupa saham bagi Perseroan Terbatas (PT). Pada koperasi Laporan Laba Rugi disebut Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha dan untuk akun-akun tertentu seperti Piutang, Pendapatan, dan Kewajiban harus dibedakan antara transaksi yang terjadi dengan anggota dan non anggota. Mengingat koperasi mempunyai ciri yang berbeda dengan badan usaha lainnya, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan standar bagi koperasi yang dikenal dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang mengatur tentang seluruh aturan badan usaha koperasi serta konsep dasar bentuk penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan koperasi merupakan suatu pelaporan mengenai pertanggung jawaban kegiatan usaha kepada pemilik luar yang mempunyai hubungan dengan koperasi baik sebagai anggota koperasi maupun sebagai kreditur yang terdiri dari: (1) Neraca; (2) Perhitungan Hasil Usaha; (3) Laporan Perubahan Ekuitas ; (4) Laporan Arus Kas; dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan, dan ketidaktepatan. Untuk meminimumkan bahaya ini, profesi akuntansi mengesahkan seperangkat standar dan prosedur umum yang disebut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (*generally accepted accounting principle*). Di Indonesia prinsip akuntansi ini disusun dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar akuntansi adalah pedoman pokok penyusunan dalam penyajian laporan keuangan yang harus diacu oleh setiap perusahaan dalam penyusunan Laporan perubahan ekuitas bertujuan menyajikan

laba/rugi koperasi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut.

Laporan Arus Kas menyajikan Informasi arus kas suatu badan usaha yang berguna sebagai dasar menilai kemampuan badan usaha dalam menghasilkan Kas atau Setoran Kas serta menilai kebutuhan suatu badan usaha terhadap Kas tersebut. Koperasi menyajikan Arus Kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Pada badan usaha koperasi, penyajian Laporan Arus Kas juga tidak berbeda dengan penyajian pada badan usaha lain yaitu meliputi Saldo Awal Kas, Sumber Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas dan Saldo Akhir Kas pada periode tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUMKM/IX/2015, tentang “Pedoman Umum Akuntansi Koperasi” pasal 3

dalam J. Lambey, Robert (2015:55), maka setiap koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik, dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Menurut Tanugraha (2012: 3) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk mempermudah perusahaan kecil dan menengah. SAK ETAP ini dimaksudkan agar semua usaha menyusun laporan keuangan

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar SAK ETAP ini cukup sederhana dan tidak akan menyulitkan penggunaannya

Penelitian tentang penerapan SAK ETAP pada koperasi telah banyak dilakukan. Seperti halnya pada penelitian Atas Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Seperti halnya pada penelitian Tri Lestari (2016) dengan judul Penelitian yakni “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan berdasarkan SAK ETAP Tahun 2013”. Hasil penelitian menyatakan bahwa laporan keuangan pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan tidak sesuai SAK ETAP

Dihapuskannya PSAK No. 27 tentang Perkoperasian, diberlakukannya SAK ETAP sebagai acuannya, diharapkan koperasi mampu memberi gambaran kinerja manajemen pada masa lampau serta untuk prospek dimasa yang akan datang serta dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan diantara koperasi terutama daya bandingnya.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan koperasi simpan pinjam yang terdapat di Kota Medan. Lewat Koperasi Simpan Pinjam, pegawai bisa menyimpan dan meminjam uang dengan mudah. Selain itu, bunga pinjamnya juga terbilang jauh lebih kecil dibanding bunga bank. Anggota yang menyimpan uang akan diberi imbalan menabung dan anggota yang meminjam uang akan dikenakan biaya jasa berupa bunga dengan jumlah kecil. Dalam pertanggungjawabannya, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota

Medan membuat laporan keuangan. Berikut laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan Tahun 2017

PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI NERACA PER 31 DESEMBER 2017			
Nama Perkiraan	Jumlah	Nama Perkiraan	Jumlah
<u>Aktiva Lancar</u>		<u>Hutang Lancar</u>	
Kas dan Bank	251.247.947	Dana-Dana	2.122.255.662
Piutang Simpan Pinjam	17.438.593.56		
	5	Pinjaman Modal	7.107.650.000
Jumlah Aktiva Lancar	17.689.841.51	Jasa Yh Msh Hrs Dibayar	-
	2	Utang Pajak	-
<u>Penyertaan</u>		Utang Lainnya	-
Pada Bukopin	22.453.764	Jumlah Hutang Lancar	9.229.905.662
Pada GKPRI	438.765.228		
Pada IKPRI	55.020.000		
Jumlah Penyertaan	516.238.992	<u>Utang Jangka Panjang</u>	
<u>Aktiva Tetap</u>		utang Bank	2.242.353.207
Inventaris	79.056.350	Jumlah Penyertaan	2.242.353.207
Bangunan Akumulasi Penyusutan	-185.457.594		
Jumlah Aktiva (Netto)	935.156	<u>Kekayaan Bersih</u>	
		Simpanan Anggota	5.081.544.891
		Cadangan	1.492.344.244
		Donasi	10.300.000
		SHU Tahun Ini	150.567.656
			6.734.756.791
	18.207.015.66		18.207.015.66
TOTAL AKTIVA	0	TOTAL PASIVA	0

Sumber : *Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan, 2017*

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan belum sesuai dengan SAK ETAP (SAK ETAP paragraf 4.2), dimana tidak terdapat Kewajiban

Diestimasi dan ekuitas. Menurut Robert (2015:55), menyatakan bahwa, dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Berdasarkan uraian diatas dan mengingat pentingnya penerapan akuntansi pada koperasi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Perkoperasian pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan tidak menyajikan informasi tentang dasar menyajikan laporan arus kas.
2. Laporan keuangan tidak menyajikan informasi tentang dasar menyajikan laporan perubahan ekuitas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang ingin diteliti, yaitu :

1. Bagaimana penyajian akuntansi pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan telah sesuai dengan SAK ETAP ?
2. Bagaimana penerapan akuntansi pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan telah sesuai dengan SAK ETAP ?
3. Bagaimana pencatatan akuntansi pada pusat koperasi pegawai republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan telah sesuai dengan SAK-ETAP?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan telah sesuaidengan SAK ETAP.
- b. Untuk mngetahui apakah penerapan akuntansi perkoperasian pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan sesuai dengan SAK ETAP.
- c. Untuk mengetahui apakah pencatatan akuntansi perkoperasian pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan sesuai dengan SAK ETAP.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis
Mengetahui secara langsung penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan dalam hal ini laporan keuangan koperasi serta dapat membandingkan antara teori dan praktik di lapangan.
- b. Bagi perusahaan
Sebagai bahan acuan dalam penerapan standar dalam penyusunan laporan keuangan agar semakin baik untuk perkembangan koperasi kedepannya.

c. Bagi pembaca

Sebagai referensi dan informasi bagi peneliti berikutnya untuk masalah yang sama pada masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Menurut Sanjari (2012:7) “Koperasi merupakan singkatan dari kata ko/co dan operasi (*operation*), Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama”. Sedangkan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian Pasal 1

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi adalah “Badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Hal ini mengandung makna bahwa koperasi sebagai badan usaha memiliki perbedaan dengan badan usaha lainnya yang dapat dilihat dari hakikat organisasi dan makna tujuan usaha yang terkandung. Koperasi menekankan bahwa terdapat

kesamaan kepentingan dan hak para anggotanya sehingga keputusan tertinggi pada koperasi ditentukan oleh semua anggota koperasi. Berbeda dengan badan usaha bukan koperasi yang bergantung pada kekuatan pemilik modal usaha sehingga keputusan diambil sesuai dengan signifikansi kepemilikan modal. Jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha ataupun badan hukum yang dijalankan oleh sekelompok orang dan bukan kumpulan modal dengan melandaskan kegiatannya sesuai prinsip koperasi untuk mensejahterakan kepentingan anggotanya pada khususnya.

2. Perbedaan Koperasi dan Non Koperasi

Apabila dibandingkan antara usaha koperasi dengan usaha yang dikelola oleh non koperasi, akan diperoleh perbedaannya sebagai berikut :

Tabel 1.2. Perbedaan Koperasi dan Non Koperasi

Koperasi	Ciri-Ciri	Non Koperasi
Usahanya berdasarkan kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi di antara anggotanya.	Dasar pendirian	Usahanya tidak harus sama dengan kebutuhan dan kepentingan pemilik modal. Yang penting adalah kepemilikan modal.
Minimal 20 orang (UU No.25/1992). Dasarnya adalah kelayakan usaha (anggota sebagai pengguna).	Pendiri	Dapat didirikan oleh satu orang.
Meningkatkan pendapatan anggota, dimana anggota sebagai pengguna.	Tujuan	Keuntungan perusahaan yang sebesar-besarnya, di mana pemilik modal tidak harus sebagai pengguna.
Pelayanan bagi anggota. Keuntungan bagi anggota.	Ciri usaha	Pelayanan bagi pengguna. Keuntungan bagi pemilik modal.
Anggota (kumpulan orang).	Kepemilikan	Pemegang saham (kumpulan modal)

Pemilik dan pengguna orang sama.	Hubungan kepemilikan	Pemilik dan pengguna orangnya berbeda.
Satu orang satu suara.	Pengambilan keputusan	Satu saham satu suara.
Berdasarkan jumlah transaksi anggota dengan koperasinya.	Pembagian SHU (laba)	Berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.

3. Landasan dan Asas Koperasi

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Asas ini mengandung makna bahwa diperlukan kesadaran diri setiap anggota koperasi untuk melaksanakan segala sesuatu di dalam koperasi dan untuk semua anggota koperasi. Sesuai dengan asas tersebut semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

4. Tujuan Koperasi

UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa tujuan pendirian koperasi adalah untuk memajukan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju , adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari penjelasan tujuan tersebut, hal ini mengandung makna bahwa tujuan koperasi tidak berfokus pada pencarian laba karena tolak ukur utama yang menjadi pertimbangan adalah kesejahteraan para anggotanya.

5. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi adalah suatu ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan *International Cooperative Alliance* (federasi koperasi non-pemerintahan) adalah :

- a. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
- b. Pengelolaan yang demokratis ,
- c. Partisipasi anggota dalam ekonomi,
- d. Kebebasan dan otonomi,
- e. Pengembangan pendidikan, pelatihan dan informasi.

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Pendidikan perkoperasian
- f. Kerjasama antar koperasi

6. Jenis-jenis Koperasi

Menurut buku saku perkoperasian yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2010) menyebutkan bahwa jenis koperasi terbagi atas lima, yaitu :

a. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (*owner*) dan pengguna pelayanan (*user*) anggota koperasi produsen mengolah bahan baku (*input*) menjadi barang jadi (*output*)

b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat.

c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam bertugas menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota yang memenuhi kebutuhan pelayanan keuntungan bagi anggota agar menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini, anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customer*).

d. Koperasi pemasaran

Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik (*owner*) dan penjual (*selles*) atau pemasar. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang dan jasa kepada koperasinya.

e. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa tau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa.

7. Pemodalan Koperasi

a. Sumber dan Modal Koperasi

Sumber modal koperasi terdiri dari beberapa jenis yaitu berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela serta cadangan yang dipupuk dari SHU yang merupakan kekayaan koperasi. Disamping itu juga memiliki modal yang bersifat potensial yang didasarkan pada sikap para anggotanya terhadap kopersinya. Modal ini dapat besar dapat pula kecil nilainya berkaitan dengan besar atau kecilnya kesadaran orang dalam koperasi. Selain sumber diatas yang disebut juga sebagai sumber modal intern. Koperasi dapat pula menambah modalnya berasal dari sumber ekstern yang berasal dari simpanan dan pinjaman/dopositi dari luar keanggotaan kopearasi termasuk pula dalam sumber ekstern ini misalnya berbagai fasilitas yang berasal dari pemerintah.

Simpanan pokok sebagai dasar atau modal pertama koperasi yang simpanan yang besarnya sama diwajibkan pada calon anggota saat hendak menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil lagi selama anggota yang bersangkutan masih aktif dan menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib adalah simpanan yang diwajibkan kepada anggota untuk menyetorkan dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan ini dapat ditarik kembali dengan cara dan waktu yang ditentukan koperasi, oleh anggaran dasar, ART dan keputusan-keputusan rapat anggota dengan mengutamakan kepentingan koperasi. Pada dasarnya simpanan sukarela dapat diterima dari non anggota. Simpanan ini merupakan suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan pada koperasi mungkin oleh anggota atau bukan anggota atas hendak sendiri.

Seperti uraian diatas, selain simpanan atau kredit pihak ketiga, modal tersebut dapat pula dibentuk dari cadangan yang diperoleh dari laba. Dalam hubungan memperbesar modal dapat melalui cara sebagai berikut:

1) Pembentukan cadangan

Ini tidak saja ditujukan untuk memperbesar modal tetapi juga untuk meringankan beban yang timbul dari adanya kegagalan atau kerugian usaha, melalui pengumpulan laba yang ditahan pada kondisi baik guna menjaga likuiditas dan dapat pula untuk ekspansi (perluasan usaha).

2) Laba dari setiap anggota

Sebagian laba dari setiap anggota dikhususkan untuk memperbesar modal anggota koperasi yang bersangkutan. Para anggota berkemungkinan tidak menyetujui pembentukan cadangan modal, sebab laba yang mereka terima untuk cadangan itu menjadi otomatis milik koperasi. Sebab dengan adanya kemungkinan mobilisasi anggota yang bebas di dalam koperasi maka dapat menimbulkan kedudukan koperasi menjadi kritis.

b. Lembaga-lembaga modal ekstern sebagai koperasi penunjang

Untuk keperluan kebutuhan modal ekstern tersebut maka diperlukan lembaga-lembaga atau koperasi lainnya yang mampu menjadi penyedia modal dimaksud.

1) Bank Umum Indonesia (BUKOPIN)

2) Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK)

3) Koperasi Pembiayaan Indonesia (KPI)

B. Penyajian Laporan Keuangan Koperasi

1. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi sebuah entitas. Menurut Suwardjono (2009:65) “laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lain. Menurut Zaki Baridwan (2008:17) “Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan”.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Laporan keuangan entitas dan informasi-informasi yang disajikan dalam setiap laporan keuangan sesuai yang di atur dalam SAK ETAP adalah :

a. Neraca

Neraca merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang menjelaskan posisi keuangan pada saat tertentu. Menurut Syafari (2010:107) Neraca adalah “Suatu laporan yang menggambarkan posisi aset, kewajiban dan modal pada saat tertentu”. Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu-akhir periode pelaporan (SAK ETAP).

- 1) Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan memperoleh entitas.
- 2) Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
- 3) Ekuitas adalah hak residual atas asset entitas setelah dikurangi semua kewajiban.

Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: a) Kas dan setara kas, b) Piutang usaha dan piutang lainnya, c) Persediaan, d) Properti investasi, e) Aset tetap, f) Aset tidak berwujud, g) Utang usaha dan utang lainnya, h) Aset dan kewajiban pajak, i) Kewajiban diestimasi, dan j) Ekuitas.

b. Sisa Hasil Usaha

Menurut undang – undang selisih hasil usaha adalah surplus hasil usaha atau defisit usaha yang diperoleh dari usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi pengeluaran atas berbagai beban usaha. Penghitungan hasil usaha memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. Informasi yang disajikan dalam penghitungan hasil usaha minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan
- 2) Beban keuangan
- 3) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas

- 4) Beban pajak
- 5) Laba atau rugi neto

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas bertujuan menyajikan laba/rugi koperasi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas yaitu:

- 1) Laba/rugi untuk periode
- 2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
- 3) Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan untuk setiap komponen ekuitas.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Informasi yang disajikan dalam laporan arus kas yaitu:

- 1) Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang

mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah penerimaan kas dari penjual barang dan jasa.

2) **Aktivitas investasi**

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas dari aktivitas investasi adalah pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya.

3) **Aktivitas pendanaan**

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Contoh aktivitas pendanaan adalah penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan memberi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus:

- 1) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu.

- 2) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan.
- 3) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

2. Karakteristik Kualitatif dalam Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami oleh pengguna.

b. Relevan

Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi.

c. Materialitas

Informasi yang disampaikan dalam jumlah yang cukup material. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan memiliki sifat/fungsi yang sejenis.

d. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk mencapai suatu hasil tertentu.

e. Substansi mengungguli bentuk

Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi.

f. Pertimbangan sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian.

g. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

h. Tepat waktu

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan.

i. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

C. Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi Dan Lingkungannya

Informasi mengenai laporan keuangan suatu perusahaan atau badan usaha merupakan suatu kebutuhan bagi orang-orang yang terlibat secara langsung maupun yang terlibat secara tidak langsung dengan perusahaan atau badan usaha, agar mereka bisa mengambil keputusan dengan baik dan cepat.

Definisi akuntansi menurut Warren (2008:10) adalah “Sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”. Menurut Gade (2005:5) Akuntansi adalah “Ilmu pengetahuan terapan dan seni pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus menurut sistem tertentu, mengolah dan menganalisis catatan tersebut sehingga dapat disusun suatu laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban pimpinan perusahaan atau lembaga terhadap kinerjanya”. Sedangkan Akuntansi menurut Sugiono (2009:5) adalah “Suatu proses identifikasi/pengenalan, pengukuran, pelaporan ekonomi dan Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna untuk penilaian pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukannya”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan baik oleh pihak-pihak perusahaan sendiri maupun oleh pihak luar yang mempunyai kepentingan terhadap kesatuan usaha tersebut.

2. Konsep dan Prinsip Akuntansi

Konsep atau prinsip yang berlaku dalam akuntansi yaitu mempertimbangkan hal sebagai berikut:

a. Konsep Entitas

Suatu entitas akuntansi adalah suatu organisasi atau suatu bagian dari organisasi yang terpisah dari organisasi lainnya dan individu-individu lainnya yang merupakan suatu unit ekonomi yang terpisah. Dari sudut pandang akuntansi, setiap entitas harus membuat satu garis batas atau

pemisah yang jelas disekelilingnya agar tidak mencampurkan kejadian-kejadian yang dialami oleh entitas-entitas lainnya.

b. Prinsip Keandalan

Catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan atas data yang tersedia yang paling dapat diandalkan sehingga catatan dan laporan tersebut akan menjadi akurat dan berguna.

c. Prinsip Biaya

Prinsip biaya menyatakan bahwa aktiva dan jasa yang diperoleh harus dicatat menurut harga aktualnya atau juga disebut nilai historis.

d. Konsep Kesenambungan

Sebab yang lain mengapa aktiva dicatat menurut harga perolehannya adalah adanya suatu konsep kesinambungan, yang menyatakan bahwa suatu entitas akan terus melakukan usahanya untuk masa yang tidak dapat ditetapkan atau diramalkan dimasa depan.

e. Konsep Satuan Moneter

Kita mengansumsikan bahwa daya beli dari rupiah secara relatif adalah stabil. Konsep satuan moneter ini adalah sebagai dasar untuk mengabaikan adanya efek dari inflasi didalam catatan akuntansi. Sehingga kita dapat mengurangi atau menambahkan nilai-nilai rupiah yang tercatat seolah-olah setiap rupiah tersebut memiliki daya beli yang sama. Para akuntan telah menetapkan pula cara-cara jika inflasi tersebut dihitung.

3. Jenis Laporan Keuangan

Adapun laporan jenis keuangan utama adalah sebagai berikut, antara lain yaitu :

a. Neraca

Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan ddimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan. penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan likuiditasnya atau komponen yang paling mudah dicairkan. Misalnya kas disusun lebih dulu karena merupakan komponen yang paling liquid dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya, kemudian bank dan seterusnya. Sementara itu, berdasarkan jatuh tempo, yang menjadi pertimbangan adalah jangka waktu, terutama untuk sisa pasiva. Contohnya untuk kewajiban (utang) disusun dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Misalnya pinjaman jangka pendek lebih dulu disajikan dan seterusnya yang lebih panjang.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi (*income statement*) ialah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan serta sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya ini terdapat selisih yang disebut laba

atau rugi. Jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya, perusahaan dikatakan laba. Sebaliknya bila jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah biaya, perusahaan dikatakan rugi.

c. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal ialah laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Laporan perubahan modal jarang dibuat bila tidak terjadi perubahan modal. Artinya laporan ini baru dibuat bila memang ada perubahan modal.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas ialah laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Laporan kas terdiri arus kas masuk (*cash in*) dan arus kas keluar (*cash out*) selama periode tertentu. Kas masuk terdiri uang yang masuk ke perusahaan, seperti hasil penjualan atau penerimaan lainnya, sedangkan kas keluar merupakan sejumlah pengeluaran dan jenis-jenis pengeluarannya, seperti pembayaran biaya operasional perusahaan.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan ialah laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

Artinya terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang perlu diberi penjelasan terlebih dahulu sehingga jelas. Hal ini diperlukan agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak salah dalam menafsirkannya.

D. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

1. Pengertian SAK ETAP

SAK ETAP adalah Standard akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP yaitu Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises. SAK-ETAP diterbitkan pada tahun 2009 dan berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan pada 1 Januari 2010. SAK ini diterapkan secara retrospektif namun jika tidak praktis dapat diterapkan secara prospektif yang berarti mengakui semua asset dan kewajiban sesuai SAK ETAP juga tidak mengakui asset dan kewajiban jika tidak diizinkan oleh SAK-ETAP, selain itu Mereklasifikasi pos-pos yang sebelumnya menggunakan PSAK lama menjadi pos-pos sesuai SAK-ETAP juga menerapkan pengukuran asset dan kewajiban yang diakui SAK ETAP.

2. Manfaat SAK ETAP

Dengan adanya SAK ETAP diharapkan perusahaan kecil dan menengah dapat untuk menyusun laporan keuangannya sendiri juga dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga perusahaan dapat menggunakan laporan

keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya. Manfaat lain dari SAK ETAP antara lain :

- a. Lebih mudah implementasinya dibandingkan PSAK-IFRS karena lebih sederhana
- b. Walaupun sederhana namun tetap dapat memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan
- c. Disusun dengan mengadopsi IFRS for SME dengan modifikasi sesuai dengan kondisi di Indonesia serta dibuat lebih ringkas
- d. SAK ETAP masih memerlukan profesional judgement namun tidak sebanyak untuk PSAK-IFRS
- e. Tidak ada perubahan signifikan dibandingkan dengan PSAK lama, namun ada beberapa hal yang diadopsi/modifikasi dari IFRS/IAS. SAK ETAP terdiri dari 30 Bab dan daftar istilah yang mempermudah untuk memahami SAK ini.

3. Kriteria Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas Tanpa Akuntabilitas publik adalah entitas yang memiliki dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu:

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan

Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika :

- 1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM LK) atau regulator lain untuk bertujuan penerbitan efek di pasar modal.
 - 2) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang/pedagang efek, dana pensiun, reksadana, dan bank investasi.
- b. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk bertujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah:
- 1) Pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha
 - 2) Kreditur
 - 3) Lembaga pemeringkat kredit

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

4. Penyajian Laporan keuangan

a. Penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban.

b. Kepatuhan terhadap SAK ETAP

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.

c. Kelangsungan usaha

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut.

d. Frekuensi pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan:

- 1) Fakta tersebut;
 - 2) Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek;
- dan

- 3) Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan.
- 4) Penyajian yang konsisten

E. Penelitian Terdahulu

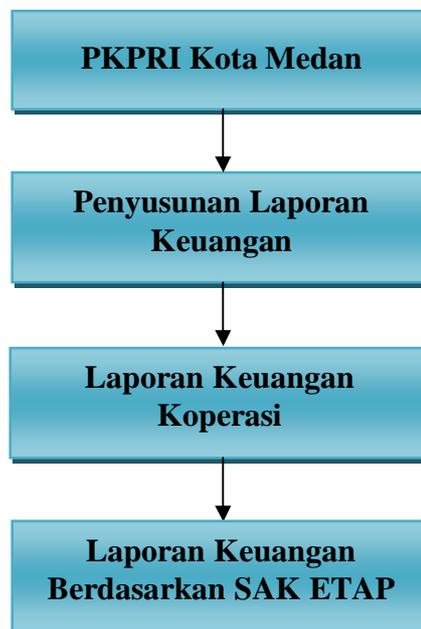
Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk memperoleh gambaran dalam menyusun kerangka berfikir penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengetahui persamaan serta perbedaan yang ada kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan dilakukan.

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Eva Punama Sari, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau (2010)	Analisis Penerapan Akuntansi Perkoperasian Pada Koperasi Banut Abadi Kabupaten Siak	Pencatatan yang dilakukan oleh Koperasi Banut Abadi kab. Siak Belum sepenuhnya dapat memberikan Informasi keuangan yang dibutuhkan.
2	Zun Fitriani, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang (2014)	Penerapan laporan pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Semarang berdasarkan SAK ETAP Tahun 2013	Pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP Tahun 2013 karena belum menyajikan kelima laporan keuangan yang di tetapkan oleh SAK ETAP Tahun 2013.
3	Rosita Dara Febry Kusmana, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya (2014)	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada KPRI Serba Usaha Migas Cepu	Pada KPRI Serba Usaha Migas Cepu belum menyajikan laporan keuangan sesuai dengan yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Tabel 1.3. penelitian terdahulu

F. Kerangka Berfikir

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan (pihak internal), laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan jenis penelitian deskriptif yaitu adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia karena penelitian deskriptif ini juga merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data, menyusun data, menginterpretasikan data dan menganalisis data sehingga memperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai masalah yang diteliti.

B. Defisional Variabel

1. Koperasi

Menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992.

2. Akuntansi

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian keadaan ekonomi suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan satu kesatuan sistem informasi pemrosesan data sehingga menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan maupun organisasi.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI). Jalan durian No 2H-1 Telp (061) 4565041-4569564 Waktu penelitian ini direncanakan pada bulan Desember 2018, sampai selesai. Adapun jadwal penelitian tersebut sebagai berikut :

Tabel 1.4.
Tempat dan waktu penelitian

No	Jenis Penelitian	Desember 2018					Januari 2019					Februari 2019					Maret 2019				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Pra penelitian	■																			
2	Pengajuan judul		■	■																	
3	Penyusunan Proposal				■	■															
4	Bimbingan proposal						■	■	■	■											
5	Seminar proposal										■	■									
6	Perbaikan proposal											■	■	■							
7	Bimbingan skripsi															■	■				
8	Sidang meja hijau																			■	

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data penelitian yang digunakan, yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti tanpa menggunakan perantara. Data primer diperoleh dengan interview atau wawancara langsung pada responden. Data tersebut antara lain tanggapan dari bagian keuangan terhadap Sistem informasi akuntansi manajemen dan kinerja keuangan pada kantor pusat koperasi pegawai republik Indonesia kota medan.
2. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi maupun data yang diperoleh di pada kantor pusat koperasi pegawai republik Indonesia kota Medan

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan Tanya/jawab langsung dengan responden yaitu dengan 5 orang staf karyawan perusahaan PKPRI kota Medan.
2. Dokumentasi, yaitu melalui pencatatan dan pengkopian data data dari PKPRI kota Medan laporan keuangan koperasi periode 2013- 2017
3. Studi pustaka, menurut Nazir (2013, h. 93) teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literaturliteratur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara

mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu:

1. Mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh data-data yang diperlukan yang bersumber dari buku-buku yang relevan dengan data penelitian dan juga tentunya dokumen-dokumen yang didapat dari lokasi penelitian.

2. Melakukan analisis terhadap data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

3. Melakukan interpretasi atas temuan hasil penelitian

Pada langkah ini kemudian dibuatlah perbandingan antara hasil dari langkah pertama di atas dengan berbagai teori yang disesuaikan dengan tema penelitian, dimana teori dan konsep tersebut mengacu pada buku-buku atau sumber tertulis lain.

4. Menyimpulkan hasil penelitian secara deskripsi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PKPRI

1.1 Sejarah terbentuknya kantor Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia

Kantor Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kota Medan didirikan pada tanggal 28 Oktober 1961. Telah diundang pengurus-pengurus koperasi primer pegawai negeri di daerah hukum kotapraja Medan, yang tergabung dalam keanggotaan Pusat Koperasi Pegawai Negeri Sumatera Utara di Medan. Rapat tersebut dihadiri lebih kurang 120 koperasi primer. Diantaranya 13 koperasi primer yang telah berbadan hukum.

Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan Pusat Koperasi Pegawai Negeri tingkat II Kotapraja Medan, sudah harus aktif bekerja dan memulai tugasnya, mulai 1 Januari Tahun 1962. Seperti hal Korpri yaitu Korps Pegawai Republik Indonesia adalah juga keanggotaannya antara lain Pegawai Negeri Sipil, Karyawan BUMN, Karyawan BUMD serta aparatur desa. Sehingga dalam kaitannya dengan keanggotaan Koperasi Pegawai Negeri, maka anggota Korps Pegawai Republik Indonesia juga adalah anggota Koperasi Pegawai Negeri yang sebelumnya anggota hanya pegawai negeri saja, yang dinamakan koperasinya adalah Koperasi Republik Indonesia.

1.2. Visi dan Misi Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan.

Adapun visi dan misi Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan adalah :

1. Visi

“Terwujudnya pelayanan yang optimal untuk peningkatan kesejahteraan anggota”.

2. Misi

- a. Meningkatkan profesionalisme pengelola koperasi
- b. Meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai pemilik koperasi
- c. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk meningkatkan pelayanan dan usaha koperasi
- d. Melakukan kerjasama usaha yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan koperasi.

1.3. Struktur Organisasi dan Susunan Kepengurusan Kantor Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kota Medan.

Struktur organisasi dan susunan kepengurusan kantor pusat koperasi pegawai negeri kota medan secara hirarkhi menganut ppla struktur organisasi fungsional, sehingga tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada setiap atau seluruh anggotanya yang terdiri dari para pegawai negeri sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing para pelaksana tugas di Kantor Pusat Pegawai Negeri Kota Medan.

Secara fungsional tugas-tugas yang dilaksanakan oleh para pelaksana yang memberikan pelayanan kepada pegawai negeri melembaga dalam satu ikatan hirarkhi organisatoris yang disebut dengan kepengurusan. Secara operasional dalam penyelenggaraan kepengurusan organisasi Kantor Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kota Medan diawasi oleh satu badan yang melembaga di tubuh kepengurusan Kantor Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kota Medan yang disebut Badan Pengawas.

Badan Pengawas memiliki 4 (empat) tahun, atau 4 (empat) tahun sekali dalam satu periode. Masa tugas badan pengawas untuk periode sekarang adalah masa bakti periode 2015 sampai dengan 2019, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap Anggota : Rajin Sitepu, SH., M. Hum
- b. Sekretaris merangkap Anggota : Dra. Susanna Iriany Sitepu
- c. Anggota : Drs. Abubakar Siddik

Badan pengawas telah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan dan beban tugas masing-masing para penyelenggara Kantor Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kota Medan. Dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi, Kantor Pusat Pegawai Negeri Kota Medan aktif dalam kegiatan organisasi perkoperasian yang dikoordinir oleh Dewan Koperasi Indonesia dan Kementrian Koperasi republik Indonesia.

Kantor Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kota Medan juga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya sering melakukan rapat-rapat kepengurusan, yaitu:

1. Rapat Anggota Kantor Pusat Pegawai Negeri Kota, setiap tahunnya 2 (dua) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rapat Anggaran Tahunan (RAT) tahun buku 2018;
Dilaksanakan bulan Mei 2019
 - b. Rapat Anggaran, Rencana Kerja RAPB tahun 2018;
Dilaksanakan bulan Desember 2018.
2. Rapat Pengurus dengan Badan pengawas dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali, terakhir dilaksanakan tahun 2014
3. Rapat Panitia atau Rapat Team Pembina Pendidikan dan Pelatihan, atau Team Evaluasi, dan Rapat-rapat internal lainnya.

Selanjutnya dalam Rencana Kerja Kantor Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kota Medan tahun 2018 ditegaskan bahwa jenis usaha yang akan dikelola Kantor Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kota Medan adalah tetap seperti Jenis usaha yang lalu, yaitu usaha simpan pinjam jangka panjang, usaha simpan pinjam, usaha simpan pinjam khusus.

Dari jenis-jenis usaha yang dikelola seperti tersebut di atas, pengawas selalu menyarankan dan mengharpkan agar pengurus dapat menjalankan jenis usaha lain yang dapat memberikan keuntungan pada Kantor Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kota Medan serta yang dapat mendukung usaha koperasi republik indonesia dan Kantor Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kota Medan.

Masa tugas Kepengurusan Kantor Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kota medan sama halnya dengan masa tugas badan pengawas yaitu menganut pola periodisasi, yaitu satu periode adalah 4 (empat) tahun.

Adapun para ketua pengurus kantor pusat koperasi pegawai negeri kota medan sesuai periodenya adalah sebagai berikut:

- a. Periode tahun 1961-1963
Ketua : Djafar Siddik
- b. Periode tahun 1963-1976
Ketua : Abdul Malik Miraza
- c. Periode tahun 1976-2010
Ketua : Drs. F. Marpaung
- d. Periode tahun 2010-2010
Ketua : Drs. B. Sagala
- e. Periode tahun 2010-2019 (Sekarang)
Ketua : Drs. H. M. Yunus Lubis

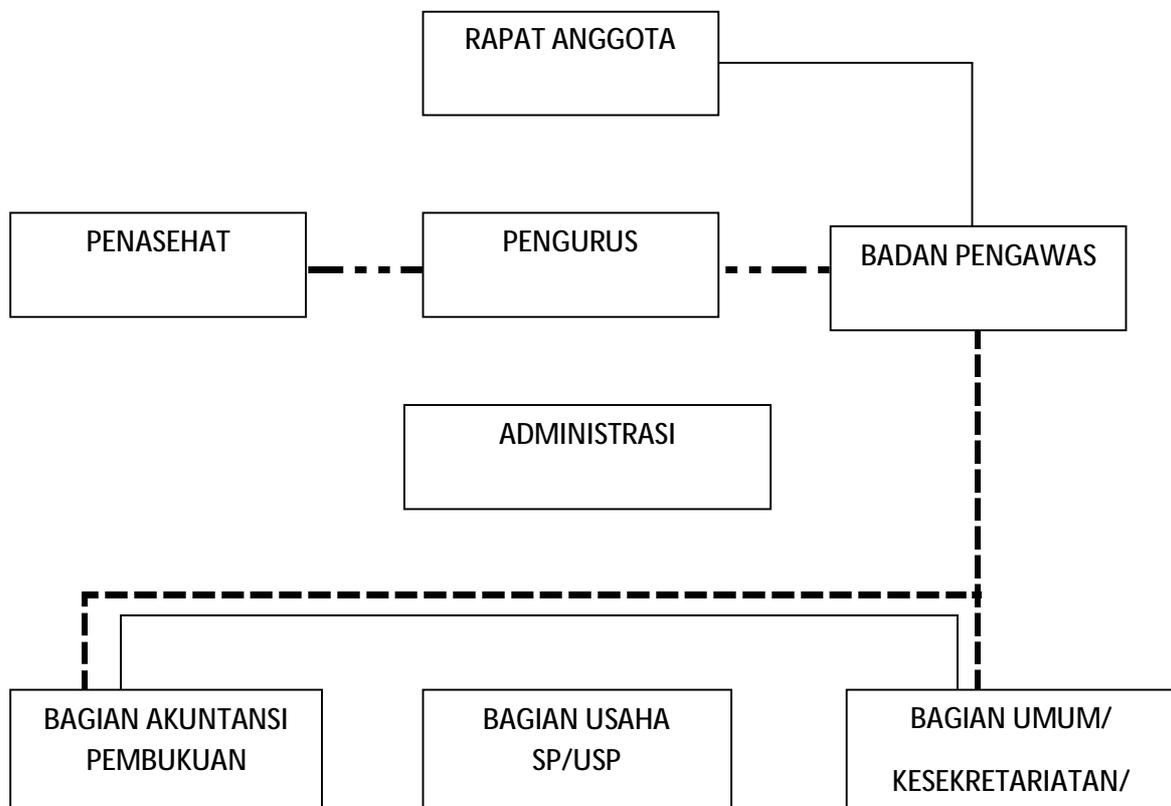
Adapun susunan pengurus Kantor Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kota Medan yang sekarang adalah masa periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- a. Ketua I : Drs. H.M. Yunus Lubis
- b. Sekretaris I : Drs. H. Tarmizi Lubis
- c. Bendahara I : Drs. Jumiadi A W,Ak.,M.Si
- d. Ketua II : Adi Susanto, SE
- e. Sekretaris II : Ramenna Tambunan, SPd
- f. Bendahara II : Ganda Panggabean
- g. Ketua III : Drs. H. Jalaluddin Siregar
- h. Sekretaris III : M. Ridha Habibi. Z, SE.,M.Si.,Ak

i. Bendahara III : Dra. Surtati Dja'far, Apt

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI PKPRI KOTA MEDAN



Sumber : Pusat Pegawai Republik Indonesia Kota Medan

a. Fungsi Rapat Anggota adalah :

- 1) Kekuasaan tertinggi.
- 2) Menetapkan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan khusus.
- 3) Menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- 4) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas.
- 5) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- 6) Mensahkan laporan pengurus.
- 7) Mensahkan laporan pengawas.
- 8) Menetapkan pembagian SHU.
- 9) Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 10) Satu anggota satu hak suara.
- 11) Meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tentang pengelolaan koperasi.
- 12) Dilakukan paling sedikit sekali dalam satu tahun.

b. Pengurus**1) Tugas Pengurus adalah sebagai berikut :**

- a) Mengelola organisasi dan usaha koperasi.
- b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana pendapatan dan anggaran belanja koperasi.

- c) Menyelenggarakan rapat anggota.
- d) Melaksanakan rencana kerja yang sudah ditetapkan rapat anggota.
- e) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- f) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- g) Mencatat setiap transaksi anggota.
- h) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- i) Meningkatkan pengetahuan anggota dengan menyelenggarakan pendidikan bagi anggota.

c. Wewenang Pengurus adalah sebagai berikut :

1. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan AD dan ART
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.
4. Mengangkat dan memberhentikan pelaksana usaha.
5. Rencana pengangkatan pengelola atas persetujuan rapat anggota.

2. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan pkpri kota medan yaitu bapak Drs. M. Yunus lubis. Demi untuk mendapatkan informasi yang seimbang peneliti juga melakukan wawancara dengan bagian bendahara pkpri kota medan yaitu bapak Drs. H. Tarmizi Lubis.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Divisi Pemasaran PDAM Tirtanadi Sumatera Utara maka dapat peneliti paparkan sebagai berikut :Terkait pertanyaan tentang “Kenapa Laporan keuangan tidak menyajikan informasi tentang dasar laporan arus kas”?

“pimpinan pkpri kota medan menyatakan bahwa karena laporan keuangan PKPRI tidak untuk di publikasikan sehingga menyajikan laporan keuangan yang mendasar saja untuk diperuntungkan bagi anggota dan untuk anggota itu tersebut.

Selanjut peneliti mengajukan tentang pertanyaan yang berkenaan dengan SAK-ETAP yaitu “Apakah penerapan akuntansi di kantor PKPRI kota medan ini sudah sesuai dengan SAK-ETAP? Dalam hal ini bendahara pkpri memberikan jawabannya: “pkpri masih belum menerapkan SAK-ETAP dikarenakan masih mengacu kepada undang-undang perkoperasian dan laporan keuangan PKPRI tidak untuk di publikasikan sehingga menyajikan laporan keuangan yang mendasar saja untuk diperuntungkan bagi anggota dan untuk anggota itu tersebut.

Terakhir peneliti menanyakan “Adakah keinginan untuk menerapkan SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangan di PKPRI ini” ? bapak

M. Yunus. Lubis memberikan jawabannya “Iya, ada keinginan suatu saat menggunakan SAK-ETAP dalam hal penerapan akuntansi dalam hal laporan keuangan tersebut. Dan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada anggotaa pkpri tersebut.

Menurut : Drs. H.M. Yunus Lubis selaku ketua I yang ada di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) menyatakan bahwa : “tujuan kami membuat laporan keuangan adalah untuk mengetahui kinerja koperasi dan juga sebagai catatan sumber informasi keuangan koperasi. Selain itu juga untuk pertanggung jawaban kepada para anggota yang bergabung dalam koperasi ketika sedang terlaksananya RAT”.

B. Pembahasan

1. Penyajian akuntansi pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan

Berikut penyajian akuntansi

a. Neraca

Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan dalam membuat laporan keuangan di neraca telah mencantumkan aset lancar, kewajiban (penyertaan), aset tetap, hutang lancar, utang jangka panjang, serta kekayaan bersih suatu entitas pada suatu tanggal tertentu pada akhir periode pelaporan (SAK ETAP paragraf 4.1).

PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI NERACA PER 31 DESEMBER 2018			
Nama Perkiraan	Jumlah	Nama Perkiraan	Jumlah
<u>Aktiva Lancar</u>		<u>Hutang Lancar</u>	
Kas dan Bank	251.247.947	Dana-Dana	2.122.255.662

Piutang Simpan Pinjam	17.438.593.565	Pinjaman Modal	7.107.650.000
Jumlah Aktiva			
Lancar	17.689.841.512	Jasa Yh Msh Hrs Dibayar	-
<u>Penyertaan</u>		Utang Pajak	-
Pada Bukopin	22.453.764	Utang Lainnya	-
Pada GKPRI	438.765.228		9.229.905.662
Pada IKPRI	55.020.000		
Jumlah			
Penyertaan	516.238.992	<u>Utang Jangka Panjang</u>	
<u>Aktiva Tetap</u>		utang Bank	2.242.353.207
Inventaris	79.056.350	Jumlah Penyertaan	2.242.353.207
Bangunan	107.336.400		
Akumulasi Penyusutan	-185.457.594	<u>Kekayaan Bersih</u>	
Jumlah Aktiva			
(Netto)	935.156	Simpanan Anggota	5.081.544.891
		Cadangan	1.492.344.244
		Donasi	10.300.000
		SHU Tahun Ini	150.567.656
			6.734.756.791
TOTAL AKTIVA	18.207.015.660	TOTAL PASIVA	18.207.015.660

Adapun pos-pos yang terdapat pada neraca Pusat Koperasi Pegawai

Republik Indonesia Kota Medan adalah sebagai berikut:

- a) Kas dan Setara Kas,
- b) Piutang Usaha dan Piutang Lainnya,

- c) Aset Tetap,
- d) Utang Usaha dan Utang lainnya
- e) Aset dan Kewajiban Pajak, dan
- f) Ekuitas.

Menurut SAK ETAP (SAK ETAP paragraf 4.2) neraca minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a) Kas dan setara kas,
- b) Piutang usaha dan piutang lainnya,
- c) Persediaan,
- d) Properti investasi,
- e) Aset tetap,
- f) Aset tidak berwujud,
- g) Utang Usaha dan Utang Lainnya,
- h) Aset dan Kewajiban Pajak,
- i) Kewajiban Diestimasi, dan
- j) Ekuitas.

Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas.

SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Dalam kalimat diatas sudah disebutkan poin-poin yang harus ada dalam laporan neraca.

Dengan membandingkan teori yang telah ada dengan data-data yang diperoleh dari perusahaan maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyajian

laporan keuangan khususnya yang terdapat pada neraca Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan tidak sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku, jadi akuntansi perkoperasian belum diterapkan oleh Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian, laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) kota medan terdiri dari laporan neraca, laporan sisa hasil usaha, laporan promosi anggota koperasi belum menerapkan dan menyajikan pelaporan keuangan akuntansi yang sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku dalam perkoperasian.

2. Penerapan akuntansi pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan
 - b. Laporan sisa hasil usaha

PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI		
PERHITUNGAN HASIL USAHA		
UNTUK TAHUN BERAKHIR, 31		
DESEMBER 2018		
Penghasilan		
Jasa/Bunga Pinjaman Anggota		2.811.790.000
Biaya-Biaya Usaha		
Biaya Gaji	642.535.600	
Biaya Bunga Pinjaman	1.664.612.000	
Biaya Pemeliharaan Harta Tetap	35.746.000	

Biaya Pembinaan Anggota	91.246.000	
Biaya Transportasi	19.501.000	
Biaya Pelatihan anggota	61.785.000	
Biaya Pemasaran	63.265.000	
Biaya Alat Tulis dan Kantor	54.299.000	
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	114.844	
Sisa Hasil Usaha		(2.633.104.444)
Pajak Penghasilan PP46 Tahun 2018		178.685.556
		(28.117.900)
		150.567.656

Pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan telah menyajikan laporan sisa hasil usaha. Adapun pos-pos yang terdapat pada laporan sisa hasil usaha Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan sebagai berikut:

- a) pendapatan,
- b) beban keuangan,
- c) beban pajak.

Laporan Sisa Hasil Usaha memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap

periode yang lalu bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

Tata cara penyusunan laporan sisa hasil usaha menurut SAK ETAP (SAK ETAP paragraf 5.3) minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan
- b) Beban keuangan
- c) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas
- d) Beban pajak
- e) Laba atau rugi neto

Dengan membandingkan teori yang telah ada dengan data-data yang diperoleh dari perusahaan maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan laporan keuangan khususnya yang terdapat pada laporan sisa hasil usaha pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan tidak sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku, jadi akuntansi belum diterapkan oleh Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan

3. Pencatatan akuntansi pada pusat koperasi pegawai republic Indonesia (PKPRI) Kota Medan.

c. Neraca

PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI NERACA PER 31 DESEMBER 2018			
Nama Perkiraan	Jumlah	Nama Perkiraan	Jumlah
<u>Aktiva Lancar</u>		<u>Hutang Lancar</u>	
Kas dan Bank	251.247.947	Dana-Dana	2.122.255.662
Piutang Simpan Pinjam	17.438.593.565	Pinjaman Modal	7.107.650.000
	<hr/>		

Jumlah Aktiva			
Lancar	17.689.841.512	Jasa Yh Msh Hrs Dibayar	-
<u>Penyertaan</u>		Utang Pajak	-
Pada Bukopin	22.453.764	Utang Lainnya	-
Pada GKPRI	438.765.228		9.229.905.662
Pada IKPRI	55.020.000		
Jumlah Penyertaan	516.238.992	<u>Utang Jangka Panjang</u>	
<u>Aktiva Tetap</u>		utang Bank	2.242.353.207
Inventaris	79.056.350	Jumlah Penyertaan	2.242.353.207
Bangunan	107.336.400		
Akumulasi Penyusutan	-185.457.594	<u>Kekayaan Bersih</u>	
Jumlah Aktiva (Netto)	935.156		
		Simpanan Anggota	5.081.544.891
		Cadangan	1.492.344.244
		Donasi	10.300.000
		SHU Tahun Ini	150.567.656
			6.734.756.791
TOTAL AKTIVA	18.207.015.660	TOTAL PASIVA	18.207.015.660

Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan dalam membuat laporan keuangan di neraca telah mencantumkan aset lancar, kewajiban (penyertaan), aset tetap, hutang lancar, utang jangka panjang, serta kekayaan bersih suatu entitas pada suatu tanggal tertentu pada akhir periode pelaporan (SAK ETAP paragraf 4.1).

Menurut SAK ETAP (SAK ETAP paragraf 4.2) neraca minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a) Kas dan setara kas,
- b) Piutang usaha dan piutang lainnya,
- c) Persediaan,
- d) Properti investasi,
- e) Aset tetap,
- f) Aset tidak berwujud,
- g) Utang Usaha dan Utang Lainnya,
- h) Aset dan Kewajiban Pajak,
- i) Kewajiban Diestimasi, dan
- j) Ekuitas.

SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Dalam kalimat diatas sudah disebutkan poin-poin yang harus ada dalam laporan neraca.

Dengan membandingkan teori yang telah ada dengan data-data yang diperoleh dari perusahaan maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyajian laporan keuangan khususnya yang terdapat pada neraca Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan tidak sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku, jadi akuntansi perkoperasian belum diterapkan oleh Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian, laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) kota medan terdiri dari laporan neraca, laporan sisa hasil usaha, koperasi belum menerapkan, pencatatan dan menyajikan pelaporan keuangan akuntansi yang sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku dalam perkoperasian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada neraca Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan tidak mencantumkan keseluruhan pos-pos yang disajikan SAK ETAP.
- b. Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan belum memasukkan seluruh pos-pos yang ada pada laporan sisa hasil usaha yang disajikan SAK ETAP.
- c. Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan belum menyajikan laporan perubahan ekuitas.
- d. Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan belum menyajikan laporan arus kas sehingga tidak diketahui informasi mengenai perubahan kas meliputi saldo awal, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
- e. Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan belum menyajikan catatan atas laporan keuangan.
- f. Pusat koperasi pegawai republik Indonesia kota medan dalam hal pencatatan akun belum sesuai dengan SAK ETAP yang diterapkan
- g. Berdasarkan catatan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan belum menerapkan SAK ETAP yang berlaku dalam perkoperasian.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi kemajuan Koperasi, khususnya Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan. Adapun saran tersebut antara lain:

- a. Mengadakan bimbingan teknis kepada para pengurus koperasi mengenai penerapan SAK ETAP.
- b. Sebaiknya penyajian laporan pada neraca Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan menampilkan keseluruhan pos-pos yang telah disajikan SAK ETAP.
- c. Sebaiknya penyajian sisa hasil usaha Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan disesuaikan dengan pos-pos yang disajikan SAK ETAP.
- d. Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan seharusnya menyajikan laporan perubahan ekuitas agar dapat mengetahui laba/rugi untuk periode tertentu.
- e. Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan harusnya menyesuaikan nama akun akun akuntansi yang sesuai dengan SAK ETAP
- f. Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan belum menyajikan laporan arus kas sehingga tidak diketahui informasi mengenai perubahan kas meliputi saldo awal, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

- g. Hendaknya Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Medan menyajikan catatan atas laporan keuangan dimana laporan ini untuk memperjelas keberadaan keuangan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2008. *Intermediate Accounting*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Eva Purnama Sari. 2010. *Analisis Penerapan Akuntansi Perkoperasian Pada Koperasi Banut Abadi Kabupaten Siak*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
- Gade, Muhammad. 2005. *Teori Akuntansi*. Cetakan I. Penerbit Almahira. Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafari. 2010. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta.
- James M. Reeve fees dan Carl S. Waren. 2008. *Pengantar Akuntansi*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Jullie J. Lambey, Robert. 2015. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam Penyajian Laporan Keuangannya pada KPRI Gelora Pendidikan Kota Tomohon. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Rosita Dara Febry Kusmana. 2014. *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada KPRI Serba Usaha Migas Cepu*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Sanjari, Anno D. 2012. *Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Koperasi*. Penerbit CV. Wahana IPTEK Bandung.
- Sugiono, Arief. 2009. *Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*. Penerbit Grasindo. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Suwardjono. 2008. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Tanugraha, Jevon. 2012. Evaluasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada PT. TDMN. Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi – Vol.1 No. 3 Mei 2012. Unika Widya Mandala. Surabaya.

Undang-undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Zun Fitriani. 2014. *Penerapan laporan pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Semarang berdasarkan SAK ETAP Tahun 2013.*
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang